



ARTA KEDATON MAKMUR
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Jl. Laks. Malahayati No. 139 Telp. (0721) 473855 (Hunting) Fax. (0721) 473882
Telukbetung - Bandar Lampung

No: 054/AKM/IV/2026

Bandar Lampung, 24 April 2026

Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR
Rumah PERBARINDO
Komp PATRA II No 46
Jl. Jend Ahmad Yani - Bypass
Cempaka Putih - Bandar Lampung

Perihal: Laporan Transparasi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Arta Kedaton.
Makmur Tahun 2025 PT. BPR Arta Kedaton Makmur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Transparasi Tata Kelola sesuai dengan ketentuan ;

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/ESOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

Bersama ini kami lampirkan Laporan Transparasi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT. BPR Arta Kedaton Makmur.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Arta Kedaton Makmur *yr*

HC. Ho Lie Tjoe
Direktur Utama



ARTA KEDATON MAKMUR
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Jl. Laks. Malahayati No. 139 Telp. (0721) 473855 (Hunting) Fax. (0721) 473882
Telukbetung - Bandar Lampung

No: 053/AKM/IV/2026

Bandar Lampung, 24 April 2026

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Lampung
Jl. Way Sekampung No. 9
Pahoman - Bandar Lampung

Perihal: Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Arta Kedaton.
Makmur Tahun 2025 PT. BPR Arta Kedaton Makmur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Transparansi Tata Kelola sesuai dengan ketentuan ;

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/ESOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

Bersama ini kami lampirkan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT. BPR Arta Kedaton Makmur.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Arta Kedaton Makmur



HC. Ho Lie Tjoe
Direktur Utama

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Arta Kedaton Makmur Tahun 2025

Dari: arta kedaton (bankartakedaton@yahoo.com)

Kepada: mailingroomkolp@ojk.go.id; julius.onggoro@gmail.com; ayodpsiomen@gmail.com

Tanggal: Rabu, 29 April 2026 pukul 15.00 WIB

Selamat Sore,

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Transparansi Tata Kelola sesuai dengan ketentuan ;

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPS/BPRS
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

Bersama ini kami lampirkan hasil scan Laporan Transparansi Penerapamn Tata Kelola Tahun 2025 PT. BPR Arta Kedaton Makmur.

Demikian kami sampaikan, atas perhaiannya kami ucapkan terima kasih.



Laporan Penerapan Transparansi Keuangan Tahun 2025.pdf

5.7 MB

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
TAHUN 2025



Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung,
Lampung
TELEPON: (0721) 473 855

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
Alamat	JALAN LAKS MALAHAYATI NO 139, TELUK BETUNG - BANDAR LAMPUNG
Nomor Telepon	(0721) 473 855

Penjelasan Umum:

Pelaksanaan tata kelola yang baik sangatlah penting di industri perbankan mengingat persaingan dan kemajuan teknologi saat ini. Dengan tata kelola yang baik dan konsisten diharapkan bank dapat bersaing dan meningkatnya kepercayaan stakeholders. Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 dan SEOJK No. 12/ SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, PT BPR Arta Kedaton Makmur senantiasa terus meningkatkan tata kelola yang baik untuk melindungi kepentingan stakeholder, dengan menerapkan 5 prinsip yaitu :

1. Keterbukaan yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan dalam mewujudkan keterbukaan BPR mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Direksi dibantu oleh satuan kerja yang memiliki fungsi dan tugas khusus, begitu pula Dewan Komisaris dibantu oleh komite - komite yang melakukan pengawasan serta pemantauan atas pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi sebagai bentuk check and balances.
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional tidak dipengaruhi oleh siapapun, namun berdasarkan pertimbangan dengan berpedoman pada ketentuan dari Otoritas Perbankan, Undang-Undang dan Otoritas lainnya.
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. 8/15

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian 2. Baik
Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama	HC. HO LIE TJOE
Jabatan	Direktur Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan / jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan
6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - a) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan
 - b) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya
 - c) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

[Handwritten signature]

9. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
10. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja / Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai Anggaran Dasar BPR dan/ atau peraturan-perundangan
11. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

2. Nama J. TUTI
Jabatan Direktur

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan / jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan
6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - a) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan
 - b) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya,
 - c) Perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
10. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja / Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai Anggaran Dasar BPR dan/ atau peraturan-perundangan

J. Tutu

11. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

3. Nama JULIUS DHARMA ONGGORO

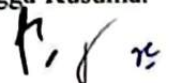
Jabatan Direktur Kepatuhan

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan / jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan
6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - a) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan
 - b) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya,
 - c) Perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
10. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja / Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai Anggaran Dasar BPR dan/ atau peraturan-perundangan
11. Direksi menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Peningkatan NPL disebabkan 3 debitur yaitu, Deddy Wahyudi, Beni Batara, Johan Angga Kusuma.



Saat ini sedang proses penyelesaian dilakukan lelang

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Jabatan	Komisaris Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
 - b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.

2.	Nama	JASKINGTO
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

p, 8 25

- a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
 - b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.

3. Nama **DISMAS IRAWAN ZIADI**
Jabatan **Komisaris**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
 - b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Pengawasan NPL jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya laporan publikasi jumlah kredit meningkat sebesar Rp 3,5 M namun cadangan kerugian penurunan nilai meningkat sebesar Rp 27,6 M. NPL Gross masih tinggi sebesar 9%.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

P. 8 re

1. Komite

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab

01. Komite Audit

Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntan yang berlaku.
 - c) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris.
- 4) Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan

dengan Perseroan.

6) Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Jumlah Rapat

8

Program Kerja Komite:

1. Review atas Laporan Audit Intern atas pemeriksaan baik kantor pusat maupun kantor cabang
2. Pemantauan debitur besar yang masuk kredit bermasalah
3. Penunjukan AP dan KAP atas Laporan Keuangan PT. BPR Arta Kedaton Makmur Tahun Buku 31 Desember 2024

Realisasi Program Kerja Komite:

SKAI telah melaksanakan pemeriksaan rutin hasilnya sudah sesuai.

2. Komite

02. Komite Pemantau Risiko

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab

1) Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.

2) Dalam kaitan dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:

a) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3) Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko

Jumlah Rapat

3

Program Kerja Komite:

1. Pemantauan Kredit, Manajemen Risiko, Likuiditas dan SDM
2. Pemantauan Tindak Lanjut hasil Audit baik Intern maupun Ekstern

P. K.

3. Pemantauan Eksternal

Realisasi Program Kerja Komite:

Semua resiko masih terjaga dengan cukup baik, walaupun ada rasio 25 debitur besar masih cukup tinggi akan tetapi masih tetap dimitigasi dengan pemberian jaminan yang kuat dan karakter debitur yang baik .

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tindak lanjut rekomendasi berupa surat dari komisaris kepada Direksi

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

1.	Nama Anggota Komite	Dismas Irawan Ziadi
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	01. Ketua Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
2.	Nama Anggota Komite	Erni Salim
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya

	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
3.	Nama Anggota Komite	Kuswandi Wirya
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
4.	Nama Anggota Komite	I Made Sutharjana
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang Hukum
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
5.	Nama Anggota Komite	JASKINGTO
	Keahlian	Memiliki kemampuan dibidang keuangan perbankan dan manajemen risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	01. Ketua Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi

T. Y.

Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	HC HO LIE TJOE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	J. TUTI
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	JASKINGTO
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	HC. HO LIE TJOE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham

f. / re

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	J. TUTI
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	JASKINGTO
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	HC. HO LIE TJOE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	J. TUTI
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	JASKINGTO
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2025, diketahui bahwa tidak terdapat kepemilikan saham

(Handwritten signature)

pada perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya potensi benturan kepentingan yang berasal dari kepemilikan saham pada entitas lain (nihil).

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	HC. HO LIE TJOE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	J. TUTI
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada

A. Y 15

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	JASKINGTO
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	HC. HO LIE TJOE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham	Tidak ada

E. Y 25

	Saham Lain di BPR	
2.	Nama	J. TUTI
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	JULIUS DHARMA ONGGORO
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	HARDI CHANDRA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	JASKINGTO
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	DISMAS IRAWAN ZIADI



Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Tidak ada

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Tidak ada

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp4.185.600.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp781.200.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp861.003.324
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp65.100.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
---------------------------------	---------



Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem
Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Tantiem 0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem
Komisaris (Rp) Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi
berbasis saham 0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan
Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi
berbasis saham 0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan
Kompensasi berbasis saham Komisaris
(Rp) Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi
lainnya 0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan
Remunerasi lainnya Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi
lainnya 0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan
Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan
(Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) Rp0



Jumlah Komisaris Penerima Perumahan 0 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris Rp0
(Rp)

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi 3 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Transportasi Direksi Rp0
(Rp)

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi 0 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris Rp0
(Rp)

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan 3 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi Rp0
(Rp)

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan 0 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris Rp0
(Rp)

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya 3 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi Rp0
(Rp)

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas 0 orang

Lain-Lainnya (Orang)

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Rp0
Komisaris (Rp)

Tunjangan lain - lain sesuai dengan SOP

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 7,83 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 5,00 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 2,00 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 6,00 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 9,81 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 11 Februari 2025

Jumlah Peserta 7 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Rencana Bisnis BPR Arta Kedaton Makmur Actual 2024 dan budget tahun 2025
2. Isu - isu strategi BPR Arta Kedaton Makmur ; peningkatan omzet ditahun 2025, penawaran kredit ke koperasi Tunas Baru dan sosialisasi ke Group Bumi Waras
3. Kebijakan Strategi BPR Arta Kedaton Makmur ; Penerapan SAK EP, pembentukan CKPN

2. Tanggal Rapat 06 Agustus 2025

P, 8 25

Jumlah Peserta 71 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan laporan keuangan juni 2025 dibandingkan dengan laporan keuangan juni tahun sebelumnya dan terhadap target
2. Isu - isu strategi BPR terkait penggabungan BPR Arta Kedaton Makmur dengan BPR Inti Dana Sentosa,
3. Kebijakan Strategi BPR Arta Kedaton Makmur ; Usaha Batubara saat ini sedang tidak baik, dimana harga baru bara yanag turun, menyebabkan banyak pemain Batubara berhenti aktivitas operasionalnya diperkirakan sampai Oktober 2025, sehingga untuk pembiayaan debitur yang bermain di Batubara beserta turunannya termasuk pemian jasa angkutan Batubara sementara ditunda atau di hold

3. Tanggal Rapat 09 September 2025

Jumlah Peserta 8 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Tindak lanjut terkait penyelesaian kredit bermasalah

4. Tanggal Rapat 24 September 2025

Jumlah Peserta 7 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Tindak lanjut terkait penyelesaian kredit bermasalah

5. Tanggal Rapat 13 November 2025

Jumlah Peserta 61 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan Terkait Debitur Bermasalah
2. Laporan Keuangan Oktober 2025 dibanding dengan laporan keuangan oktober 2024

6. Tanggal Rapat 06 Desember 2025

Jumlah Peserta 8 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan mengenai rancangan dan penggabungan merger

Hasil pelaksanaan Rapat di tuangkan ke dalam Risalah Rapat

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	HARDI CHANDRA
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	JASKINGTO
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
3.	Nama Anggota Dewan Komisaris	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada BPR tertuang didalam absen rapat

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus

f. y. 20

Hukum Pada Tahun Laporan

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

K, J, R

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Sebelumnya 0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Laporan 0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

Tidak Ada / Nihil

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap) 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah
Selesai (telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap) 0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

Nihil.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	08 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Polsek
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi Kegiatan Ibu Bhayangkari Polsek
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	28 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Postulat Novisiat SCJ Santo Yohanes
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Perayaan Dehonian Day 182
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	08 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	RT Teluk Betung
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi HUT RI Ke 80 di Kecamatan Teluk Betung
	Jumlah (Rp)	Rp500.000

K. J. R.

4.	Tanggal Pelaksanaan	14 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bappeda
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi Berenang Merdeka 2025
	Jumlah (Rp)	Rp1.700.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	14 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Kel Unit II
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi HUT RI Ke 80
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	15 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	RT 31 Kel Ganjar Asri
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi HUT RI Ke 80 Kelurahan Ganjar Asri
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	26 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Kec Pringsewu
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi HUT RI
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	09 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	RT Lempasing
	Penjelasan Kegiatan	Donasi Banjir dan Longsor untuk warga Lempasing
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	25 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Karang Taruna Pringsewu

Handwritten signature/initials

Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk Karang Taruna Pringsewu Utara
Jumlah (Rp)	Rp400.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 24 April 2026

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR 



HC Ho Lie Tjoe
Direktur Utama



Hardi Chandra
Komisaris Utama